

## **PENGEMBANGAN MATERI PELATIHAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA BAGI PERANGKAT DESA CIO DALAM KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Serlita Unya, Arie F. Kawulur, Meike B. Mamentu, Edwin Wantah  
[serlitaunya95@gmail.com](mailto:serlitaunya95@gmail.com)

### **ABSTRAK**

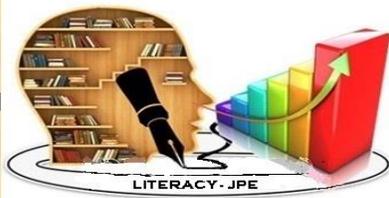
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi pelatihan Administrasi Keuangan Desa bagi perangkat desa Cio Dalam Kabupaten Pulau Morotai, mengimplementasikan konsen materi Administrasi Keuangan Desa pada proses pelatihan dengan menggunakan modul materi sebagai alternatif pembelajaran, meningkatkan kinerja Perangkat Desa dan untuk mengetahui respon perangkat desa terhadap materi pelatihan administrasi keuangan desa. penelitian pengembangan ini ,di adaptasi dari model 4D (Define, Design, Develop, Disseminate). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan FGD pada objek penelitian. Penetapan daerah observasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan perangkat desa akan pengembangan materi pelatihan administrasi keuangan desa. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari hasil wawancara dan Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Cio Dalam mengenai Administrasi Keuangan Desa tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya literasi Perangkat Desa dalam mengelola Administrasi Keuangan Desa, latar belakang pendidikan Perangkat Desa, dan tidak ada materi pelatihan administrasi keuangan desa yang menjadi pedoman mereka untuk belajar. Oleh Karena itu, ketersediaan akan materi pelatihan administrasi keuangan desa sangat mereka butuhkan untuk membantu meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam mengelola administrasi keuangan desa.

**Kata kunci: Administrasi Keuangan Desa, Materi Pelatihan, Perangkat Desa**

### **ABSTRACT**

This study aims to develop Village Financial Administration training materials for Cio Dalam village officials, Morotai Island Regency, implement Village Financial Administration material concerns in the training process using material modules as alternative learning, improve Village Apparatus performance and to determine the response of village officials to administrative training materials. village finance. This development research is adapted from a 4D model (Define, Design, Develop, Disseminate). Data collection techniques were carried out through interviews and FGDs on the object of research. The determination of the observation area is carried out by considering the needs of village officials for the development of village financial administration training materials. Based on the results of the analysis obtained from interviews and Focus Group Discussions (FGD) with the Village Head and Cio Dalam Village Apparatus regarding Village Financial Administration, it shows that there is still a lack of literacy of Village Apparatus in managing Village Financial Administration, educational background of Village Apparatus, and there is no village financial administration training materials that guide them to study. Therefore, they really need the availability of village financial administration training materials to help improve the performance of the Village Apparatus in managing village financial administration.

**Keywords: Village Financial Administration, Training Materials, Village Apparatus**



### PENDAHULUAN

Desa adalah sebuah wilayah kesatuan hukum yang memiliki batas dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Desa” diberi makna sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa), atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, atau udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), atau tanah, tempat daerah, atau suku bangsa Dayak yang mendiami beberapa desa di wilayah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, makna desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut *Bintarto (1983)*, Desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Dalam arti umum desa merupakan unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota.

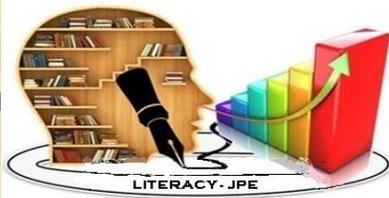
Sementara itu Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah Desa ialah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Gambaran desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan asset Desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa yang terdiri dari (a) Sekretaris Desa; (b) Kepala seksi/Kepala bagian; dan (d) Bendahara Desa.

Perangkat Desa di Indonesia adalah aparatur pemerintah yang berada langsung di posisi terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan implementasi kebijakan, baik kebijakan nasional maupun kebijakan daerah. Oleh karena itu, sangat tepat apabila perangkat desa di Indonesia disebut dengan birokrat garda terdepan. Menurut *Purwanto dan Sulistyastuti (2015)*, tercapainya tujuan kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh kinerja para birokrat garda terdepan. Hal ini karena dari keseluruhan proses implementasi kebijakan, birokrat garda depan menempati posisi paling akhir yang berinteraksi secara langsung dengan kelompok sasaran.

Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya, sekertaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. (UU No.32 th 2004).

Sekertaris desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan yaitu: berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau Sederajat, mengetahui pengetahuan tentang teknis pemerintahan, mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran, mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan, memahami soal budaya masyarakat setempat dan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan (UU No.12 Th 2008). Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sekertaris desa, pelaksanaan teknis lapangan, unsur kewilayahan jumlah perangkat desa



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas sekretaris desa yaitu (1) membantu kepala desa dibidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah desa (2) melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan (3) melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara (4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Tugas kaur pemerintah yaitu: (1) mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang pemerintahan desa, ketentraman, dan perlindungan rakyat. (2) mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta masyarakat. (3) melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi. (4) melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, gubernur, bupati, kepala desa dan kegiatan sosial politik.

Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan perangkat desa di Indonesia yang benar-benar berkualitas, profesional, amanah, dan loyal terhadap kebenaran dan kebaikan. Apalagi dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanahkan bahwa penghasilan tetap perangkat desa telah disetarakan dengan pegawai negeri sipil di Indonesia sehingga perangkat desa se-indonesia ke depannya tentu harus semakin bisa memberikan kinerja yang terbaik bagi desa, daerah, dan negara.

Dalam regulasi yang berlaku di Indonesia, definisi administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. penyelenggaraan dan pengembangan administrasi pemerintahan desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register desa disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.

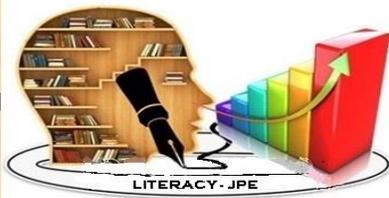
Administrasi Desa Secara terminologi, yang disebut administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola (Ali F, 2011). Lebih lanjut lagi Anggara S, (2012) administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Dari dua pendapat ini jelas bahwa administrasi itu adalah kegiatan mengurus, mengatur menata dan mengelola terhadap suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Dari pendapat di atas juga dapat dimaknai bahwa administrasi desa sebagai kegiatan pengelolaan administrasi yang dilakukan di suatu wilayah pedesaan, karena administrasi desa merupakan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan. Kegiatan dan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dimuat dalam administrasi keuangan desa. Administrasi keuangan desa meliputi: Buku APB Desa; Buku Rencana Anggaran Biaya; Buku Kas Pembantu Kegiatan; Buku Kas Umum; Buku Kas Pembantu; dan Buku Kas Desa.

Permendagri no 20 tahun 2018 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam hal ini, Perangkat Desa harus mempunyai pengetahuan khusus terutama dalam mengelola administrasi keuangan desa sehingga keuangan Desa dapat terkelola dengan baik. Oleh karena itu, Materi Pelatihan Administrasi keuangan Desa sudah pernah diberikan oleh beberapa



pejabat pemerintah dalam BIMTEK yang dilakukan bagi perangkat desa Pulau Morotai didalamnya termasuk Perangkat Desa Cio-Dalam. Namun, Perangkat Desa Cio-Dalam umumnya memiliki latar belakang pendidikan menengah dan tidak memiliki pengalaman belajar administrasi keuangan sebelumnya di sekolah, untuk itu literasi pengetahuan pengelolaan keuangan perangkat Desa Cio-Dalam masih kurang, materi pelatihan juga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan pengelolaan administrasi keuangan desa sehingga jika materi yang diberikan tidak efektif maka berdampak pada kemampuan perangkat desa dalam mengelola administrasi keuangan desa dan kinerja dari perangkat desa itu sendiri. Disamping itu juga, materi yang diterima dalam BIMTEK hanya berupa pemaparan slide sehingga sewaktu-waktu mereka bisa lupa karena tidak ada modul yang bisa mereka bawa kemana-mana ketika mereka perlu untuk belajar. Untuk itu perlu materi pelatihan pengelolaan administrasi keuangan desa tersebut secara baik dan benar, tentu saja hal ini diperlukan tata kelola administrasi desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem administrasi yang standar diperlukan dalam pengelolaan desa tersebut. Pelatihan adalah salah satu cara agar pengelolaan administrasi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar oleh perangkat desa (Onsardi, O., Sumarlan, A., & Finthariasari, M., 2019).

Oleh karena itu diperlukan Pengembangan materi pelatihan terkait “Administrasi Keuangan Desa bagi perangkat Desa Cio-Dalam untuk mencapai cita-cita Undang-Undang Desa yaitu menjadi Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi pelatihan Administrasi Keuangan Desa bagi perangkat desa Cio Dalam Kabupaten Pulau Morotai, mengimplementasikan konsep materi Administrasi Keuangan Desa pada proses pelatihan dengan menggunakan modul materi sebagai alternatif pembelajaran, meningkatkan kinerja Perangkat Desa dan untuk mengetahui respon perangkat desa terhadap materi pelatihan administrasi keuangan desa.

## METODE PENELITIAN

### 1) Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya sebagai suatu karya ilmiah dengan menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D). Menurut Sugiyono (2013) “Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut”. Sebelum menghasilkan produk tertentu, peneliti harus menganalisis permasalahan terlebih dahulu sehingga produk yang dihasilkan akan sesuai dengan permasalahannya dan kemudian diuji keefektifan dari produk tersebut. (Borg and Gall, 1987: 772) Menyatakan bahwa “educational research and development (R and D) is a process used to develop and validate educational products”. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian bersifat analisis kebutuhan. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan.

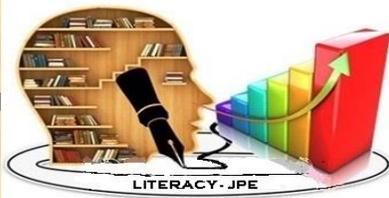
Penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang akan digunakan dalam penelitian. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah pengembangan materi pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa Cio Dalam Kabupaten Pulau Morotai.

Pengembangan bahan ajar interaktif dalam penelitian ini mengacu pada pengembangan perangkat pembelajaran model 4-D (Four D Model), yaitu model pengembangan yang terdiri dari *Define* (Pendefinisian), *Desain* (Perencanaan/Desain), *Develop* (Pengembangan) dan *Disseminate* (Pendesiminasian/penyebaran).

### 2) Tempat dan Waktu Penelitian

#### Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Cio Dalam Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini untuk mengembangkan materi pelatihan administrasi keuangan desa.



### Waktu Penelitian

Penelitian pengembangan materi pelatihan administrasi keuangan desa ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2020-Desember 2021

### 3) Subjek dan Objek Penelitian

#### Subjek Penelitian

Subjek pada tahap ini adalah perangkat desa Cio Dalam yang berjumlah 3 Orang yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala seksi/Kepala bagian; dan Bendahara Desa.

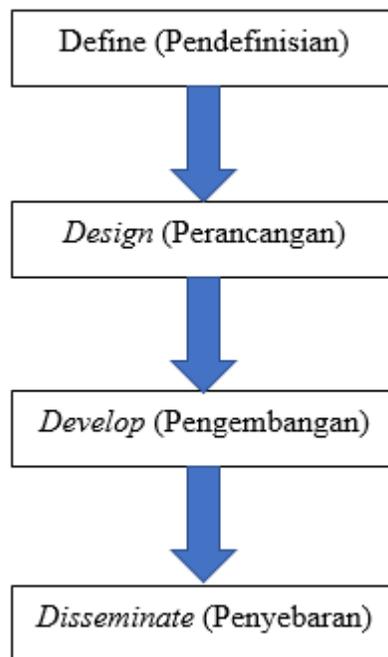
#### Objek Penelitian

Dalam penelitian ini Objek yang akan diteliti adalah kelayakan pengembangan materi pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa Cio Dalam Kabupaten Pulau Morotai.

### 4) Prosedur Pengembangan

Pengembangan bahan ajar interaktif dalam penelitian ini mengacu pada pengembangan perangkat pembelajaran model 4-D (Four D Model), Model 4D dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel pada tahun 1974. Sesuai namanya, model 4-D terdiri dari 4 tahapan utamaya yakni *Define* (Pendefinisian), *Design* (Perancangan), *Develop* (Pengembangan), dan *Disseminate* (Penyebaran).

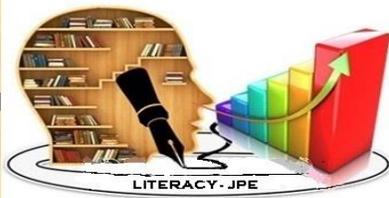
#### Tahap Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 4D



#### 1. *Define* (Pendefinisian)

Pendefinisian dalam hal ini diantaranya untuk menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan di dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini peneliti melakukan studi pendahuluan dengan melakukan observasi terhadap perangkat Desa Cio Dalam Kabupaten Pulau Morotai melalui wawancara, dan penyebaran angket.

Perangkat Desa sebagai informasi kunci karena paling berkompeten mengungkap kondisi nyata dampak pengelolaan keuangan desa. Dalam pengembangan model pelatihan pengelolaan



keuangan mereka tidak hanya sebagai informan, tetapi juga berperan sebagai penelaah dan penilai produk.

Pada tahap ini dikemukakan tujuan pengembangan produk yang akan dilakukan, yaitu menciptakan materi belajar pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan literasi pengetahuan pengelolaan keuangan Desa.

### 2. *Design* (**Perancangan**)

Tahap perancangan dilakukan berdasarkan hal-hal yang diperoleh dari tahap define/pendefinisian. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perancangan berupa gambaran secara keseluruhan materi yang disusun sesuai referensi yang ada, materi yang disusun diurutkan dan dijelaskan sehingga memudahkan perangkat desa untuk mengerti.

### 3. *Develop* (**Pengembangan**)

#### a. Pembuatan produk

Pembuatan produk berupa modul materi. Produk ini diberi nama pelatihan pengelolaan keuangan dengan seluruh komponen yang telah disiapkan pada tahap design/perancangan.

#### b. Validasi

Produk materi pelatihan yang dibuat divalidasi oleh ahli konten materi. Masukan dan saran ahli materi dijadikan dasar revisi materi latihan.

#### c. Revisi 1

Berdasarkan masukan dari tahap validasi, dilakukan revisi berdasarkan masukan dari ahli revisi.

#### d. Uji coba produk

Produk materi pelatihan yang telah direvisi dan telah dinyatakan layak memenuhi kebutuhan penggunaan kemudian diuji coba pada tahap sesungguhnya. Tahap ini dilaksanakan pada 3 perangkat Desa Cio Dalam Kabupaten Pulau Morotai. Pada tahap ini anggota dibagikan angket untuk mengukur dan mengetahui pendapat/respon mereka mengenai materi pelajaran yang telah dibuat.

Untuk mengetahui efektifitas materi pelatihan yang telah dikembangkan, selanjutnya anggota diberi tes berupa kuis/pertanyaan. Jika hasil uji coba produk berkualitas baik atau sangat baik maka produk tersebut dinyatakan final, namun jika berkualitas cukup, kurang atau sangat kurang maka produk tersebut harus dilakukan revisi 2.

#### e. Revisi 2

Berdasarkan masukan dari anggota, maka akan dilakukan revisi. Dalam revisi ini peneliti akan mempertimbangkan masukan dan saran dari validator agar tidak bertentangan dengan perbaikan sebelumnya.

#### f. Produk akhir

Produk akhir yang dihasilkan berupa pengembangan materi pelatihan pengelolaan keuangan Desa bagi perangkat Desa Cio-Dalam Kabupaten Pulau Morotai, materi telah teruji validasinya dan dapat dikatakan layak sebagai materi dalam pelatihan.

### 4. Disseminate (**Penyebaran**)

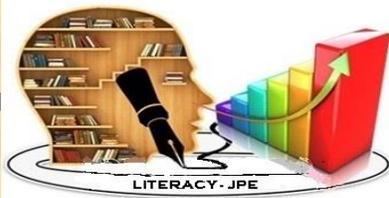
Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan disseminate/penyebaran materi pelatihan karena keterbatasan dana dan waktu sehingga hanya dibatasi sampai pada tahap Develop (Pengembangan).

## 5) Teknik Pengumpulan Data

### 1. Jenis data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data kualitatif dan data kuantitatif, yaitu :

- a. Data kualitatif merupakan data tentang proses pengembangan materi pembelajaran berupa kritik dan saran dari para ahli materi, praktisi pembelajaran pengelolaan keuangan dan respon.



- b. Data kuantitatif adalah data pokok dalam penelitian ini yang berupa penilaian kelayakan materi pembelajaran dari para ahli materi, praktisi pembelajaran, data respon perangkat desa mengenai materi pembelajaran yang telah dikembangkan.

### 2. Instrument Pengumpulan Data

Sumadi Suryabrata (2008:52) berpendapat bahwa instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:265) instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Karena itu instrument yang digunakan dalam pengumpulan data pada tahap ini menggunakan kuesioner/angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Menurut Suharsimi Arikunto (2014) menyatakan bahwa angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memeberikan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. (Sugiyono, 2012:93) menyatakan skala likert dalam mengukur kelayakan bahan ajar menggunakan menggunakan lima alternatif jawaban yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Data kualitatif tersebut kemudian diubah menjadi data kuantitatif sesuai dengan ketentuan pemberian skor yaitu:

#### Ketentuan Pemberian Skor

SB (Sangat Baik)	4
B (Baik)	3
K (Kurang)	2
SK (Sangat Kurang)	1

### 3. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis untuk mengetahui penilaian dan pendapat terhadap produk materi pelatihan yang telah dihasilkan.

Sugiyono (2018:482) menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh melalui angket adalah teknik deskriptif kualitatif memanfaatkan presentase.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase dari masing-masing subjek adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum X}{\text{SMI}} \times 100\%$$

Keterangan:

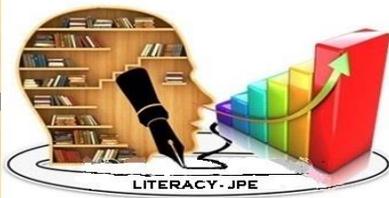
$\sum X$  = Jumlah Skor

SMI = Skor Maksimal Ideal

Selanjutnya untuk menghitung persentase keseluruhan subjek, digunakan rumus:

$$\text{Persentase} = \frac{F}{N}$$

Keterangan:



F = Jumlah Persentase Keseluruhan Subjek

N = Banyak Subjek

#### 4. Desain Uji Coba

Untuk desain uji coba materi pelatihan keuangan bagi perangkat Desa Cio Dalam ini menggunakan desain uji coba dengan penelitian action research yang mengadopsi model action research yang dikembangkan oleh Rory O Brien.

Adapun bagan siklus Action Research dari Rory O Brien dapat dipaparkan dalam gambar berikut ini:



**Gambar 3.3 Siklus Action Research dari Rory O Brien (Desain Uji Coba Materi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa)**

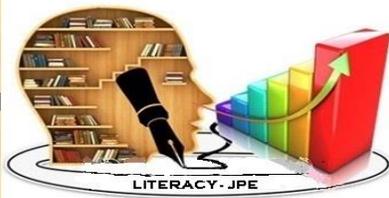
## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Hasil Pengembangan Tahapan Pertama (Define) yaitu identifikasi masalah dan pendefinisian kebutuhan (analisis kebutuhan) perangkat desa Cio Dalam Kabupaten Pulau Morotai akan Pengetahuan administrasi keuangan desa.**

Pada tahap awal penelitian pengembangan ini dilaksanakan, dimulai dengan adanya identifikasi masalah dan analisis kebutuhan mengenai masalah dan kebutuhan yang terkait dengan perilaku perangkat desa Cio Dalam Kabupaten Pulau Morotai akan administrasi keuangan desa. pendefinisian dalam hal ini diantaranya untuk menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan di dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini peneliti melakukan studi pendahuluan dengan melakukan observasi terhadap beberapa perangkat desa Cio Dalam melalui wawancara, dan FGD (Focus Group Discussion).

Perangkat Desa Cio Dalam Kabupaten Pulau Morotai dilibatkan sebagai informan kunci karena untuk mengungkap kondisi nyata dampak pelatihan administrasi keuangan desa. dalam pengembangan materi pelatihan administrasi keuangan desa, perangkat desa tidak hanya sebagai informan, tetapi juga berperan sebagai penelaah dan penilai produk. Disamping itu, ahli administrasi keuangan dilibatkan apabila peneliti mengalami kesulitan para ahli bersedia memberikan layanan konsultasi.

Hasil identifikasi masalah dan analisis kebutuhan yang dilaksanakan dengan perangkat desa Cio Dalam Kabupaten Pulau Morotai menggambarkan bahwa mereka sangat kesulitan mengelola keuangan desa akibat literasi administrasi keuangannya yang masih minim. Hal ini berimplikasi pada perilaku konsumtif mereka sehari-hari. Dampak lain yang diakibatkan dari minimnya literasi



administrasi keuangan desa yang tidak baik adalah administrasi keuangan desa yang tidak efisien sehingga berdampak pada kinerja perangkat desa itu sendiri. Dalam identifikasi masalah dan analisis kebutuhan administrasi keuangan desa oleh perangkat desa Cio Dalam ini juga teridentifikasi bahwa mereka sangat membutuhkan materi serta pelatihan administrasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam administrasi pengelolaan keuangan desa, yang menjadi subjek penelitian adalah perangkat desa. dalam hal ini, penuturan dari salah satu perangkat desa mengatakan bahwa dalam menyiapkan laporan keuangan sering mengalami kendala dalam administrasi keuangan karena kurangnya literasi pengetahuan administrasi keuangan (PD.DB.01). Persoalan lainnya teridentifikasi oleh wawancara dalam FGD peneliti dengan perangkat desa adalah materi pelatihan yang mereka terima dari BIMTEK hanya berupa pemaparan di silde yang sewaktu-waktu mereka bisa lupa karena tidak ada materi pegangan berupa modul, dan juga pembicara dalam BIMTEK yang sering menggunakan istilah-istilah atau kata-kata yang sulit dipahami sehingga membuat mereka tidak paham.

Dari hasil analisis kebutuhan materi pelatihan administrasi keuangan desa terungkap dari salah seorang perangkat desa sebagai responden penelitian mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang benar mengenai bagaimana mengelolah administrasi keuangan desa yang benar mengenai administrasi keuangan desa dan mereka membutuhkan materi dalam bentuk modul agar menjadi pegangan bagi mereka yang mau belajar sewaktu-waktu mereka perlukan sehingga literasi pengetahuan tentang administrasi keuangan desa pada perangkat desa bisa meningkat dan membuat kinerja mereka lebih baik.

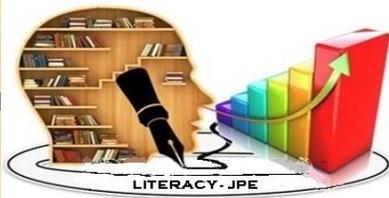
Dari hasil paparan dalam identifikasi masalah dan analisis kebutuhan yang dapat disimpulkan bahwa perangkat desa Cio Dalam sangat membutuhkan akan pemahaman dan pengetahuan administrasi keuangan desa. Salah seorang responden mengatakan bahwa materi pelatihan administrasi keuangan desa dengan kata-kata yang mudah dipahami sangat membantu dan memudahkan mereka untuk belajar (PD.AM.02).

### **Hasil Pengembangan Tahapan Kedua (Develop) Yaitu Penyusunan dan Perancangan Materi Pelatihan Administrasi Keuangan**

Dalam tahapan penyusunan atau perancangan prototype materi pelatihan administrasi keuangan desa bagi perangkat desa Cio Dalam Pulau Morotai ini melibatkan peneliti dan dosen pembimbing tesis. Dasar penyusunan materi administrasi keuangan desa di ambil dari hasil identifikasi masalah dan pendefinisian analisis kebutuhan perangkat desa Cio Dalam. Penyusunan dan perancangan awal prototype materi selain menggunakan data primer wawancara dan FGD, penyusunan dan prototype menggunakan juga referensi buku, jurnal, artikel serta tulisan online yang terkait dengan bagaimana mengelola administrasi keuangan desa yang benar. Keterlibatan dosen pembimbing tesis dalam proses penyusunan dan perancangan materi administrasi keuangan desa adalah untuk memberikan masukan, koreksi, serta pemberian saran-saran konstruktif bagi kesempurnaan materi pelatihan administrasi keuangan desa yang disusun dan dirancang oleh peneliti.

Pada materi pertama terkait dengan administrasi keuangan desa secara umum dijelaskan mengenai tahapan administrasi keuangan desa yang dimulai dari kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan, terdiri dari: buku anggaran penerimaan, buku anggaran pengeluaran rutin, buku anggaran pengeluaran pembangunan, buku kas umum, buku kas pembantu penerimaan, buku kas pembantu pengeluaran rutin, buku kas pembantu pengeluaran pembangunan.

Untuk materi yang kedua mengenai mengelola keuangan desa dipaparkan mengenai bagaimana asas pengelolaan keuangan desa, struktur organisasi keuangan pemerintah desa, perencanaan



keuangan desa, proses penganggaran APB desa, struktur APB desa, pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan, dan perubahan APB Desa.

Setelah materi disusun dalam bentuk prototype modul administrasi keuangan desa, materi kemudian diringkas dan dimasukkan dalam slide presentasi dan dalam bentuk PDF agar dapat digunakan dalam Hp android sebagai cara belajar dimanapun perangkat desa berada.

### KESIMPULAN

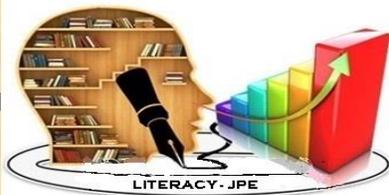
Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis kebutuhan perangkat desa Cio Dalam, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat desa membutuhkan bahan ajar tentang bagaimana mengelola administrasi keuangan desa dalam rangka implementasi pengelolaan keuangan desa yang baik untuk peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa serta pemerintah desa yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Materi Pelatihan ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, yang dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Pada akhirnya, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa tetap harus mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Materi ini bisa dijadikan referensi penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tersebut dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus N Cahyo. 2013. *Panduan Aplikasi Teori-Teori Belajar Mengajar Teraktual Dan Terpopuler*. Jogjakarta: Divapres. Hal.33
- Amin Suprihatini, 2007. *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Cempaka Putih: Klaten
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi desa kota dan permasalahannya*. Ghalia Indonesia Yogyakarta
- Hamalik, Oemar. 2007. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kurnianingrum Farida. 2021. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 2021* Mulyatiningsih, E. 2011. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Alfabeta
- Mutiara S. Panggabean. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia



O'Brien & Marakas. 2010. *Management Informations Systems. Eight Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*

Puslijaknov. 2008. *Metode Penelitian Pengembangan*. Departemen Pendidikan Nasional  
Rivai, Veitzhal dan Sagala, Ella Jauvani. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari teori ke praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Rusman. 2013. *Model-Model Pembelajaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: CV Alfabeta

Suryabrata sumandi. 2008. *Metodologi Penelitian/sumadi suryabrata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Thiagarajan, S., Semmel, D. S & Semmel, M. I. 1974. *Instructional Development for Training Teachers of Expectional Children*. Minneapolis, Minnesota:

Leadership Training Institute/Special Education, University of Minnesota. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 2004. Yudrik Jahja. *Psikologi Perkembangan*.

Jakarta. 2013. Kencana Prenamadia Group. hlm: 100- 102

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Pendidikan Non-Formal*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Perangkat Desa*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *Tentang Perangkat Desa*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

### Internet:

<https://bustangbuhari.wordpress.com/2011/08/25/four-d-model-model-pengembangan-perangkat-pembelajaran-dari-thiagarajan-dkk/>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pendidikan-non-formal/>